



Tiga SKPD Review Aset Belum Jadi Temuan BPK

SINGKAWANG- Pemerintah Kota Singkawang sedang mereview aset di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang, Muslimin mengatakan sesuai arahan BPK. Review sedang dilakukan dengan melibatkan Kantor Inspektorat Kota Singkawang.

"Setelah hasil BPK keluar, kita sudah tindak lanjut. Diantaranya telah turun mengecek langsung ke SKPD," kata Muslimin, Senin (10/8).

Menurutnya, dari apa yang telah dilakukan. Dari sebanyak 17 SKPD yang belum mencatat aset, 14 telah diselesaikan. Sementara tiga SKPD, sedang dalam proses. "Tinggal Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan," katanya.

Selain telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Sebut Muslimin, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sudah melaksanakan rapat internal sebanyak dua kali. "Kita sudah rapatkan data ataupun Pegawai Negeri Sipil yang memegang aset. Kemudian melihat (bentuk aset) baik kondisi sekarang atau memang sudah hilang," katanya.

Jika memang hilang, akan dilakukan penilaian berapa kerugian yang harus dikembalikan (sesuai

Tiga SKPD Review Aset

Sambungan dari halaman 17

jenis aset yang hilang). "Biasanya akan terjadi penyusutan, misalkan pengadaan laptop di tahun 2010, kemudian hilang di tahun 2012. Tentu akan ada penyusutan, inilah yang sedang kami hitung. Tapi terpenting, sudah dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap aset yang hilang tersebut," katanya.

Apakah sudah ada langkah eksekusi dari penyelesaian aset-aset tersebut. Muslimin menyebutkan belum ada. "Sampai dengan saat ini, tidak ada mengarah ke tindakan eksekusi," katanya. Setelah

diketahui, hasil inilah yang akan disampaikan ke inspektorat. "Dari inspektorat akan diteruskan kembali ke SKPD terkait," katanya.

Nantinya bertepatan pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus mendatang. Bagi pejabat memegang aset, akan diminta menghadirkan ke halaman Kantor Walikota. Kalau memang tidak dihadirkan, akan diberikan waktu 3 x 24 jam. Jika belum juga dilaksanakan, akan diberikan surat pemberitahuan terakhir dan bisa saja akan dijempur.

Muslimin menambahkan, pihaknya bertekad untuk me-

nyelesaikan permasalahan aset di Kota Singkawang. Terutama sekali aset-aset dari Kabupaten Induk yang hingga kini belum juga selesai. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Nadjib terkait dengan hasil pemeriksaan BPK yang menyebutkan Dinas yang dipimpinya belum mencatat nilai aset tetap, peralatan dan mesin pada 29 Sekolah negeri, menyebutkan khusus untuk permasalahan lahan sekolah. Rata-rata sekolah di Kota Singkawang tanahnya belum bersertifikat. "Umumnya sekolah kita di Singkawang tanahnya belum bersertifikat, sebagian lagi surat-suratnya

masih belum diserahkan oleh kabupaten induk, baik Sambas dan Bengkayang," kata Nadjib.

Sementara mengenai aset-aset berupa bangunan, peralatan dan mesin yang ada di sekolah-sekolah. "Kita akan segera merampungkan pendataannya dengan sekolah-sekolah tersebut," katanya.

Mengingat, pengadaan bantuan-bantuan peralatan ke sekolah di Singkawang berasal dari berbagai sumber, baik APBD Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Bantuan Sosial (Bansos), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (fah)